



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dewan Menilai BUMD Tak Terlalu Butuh PMD

Palmerah, Warta Kota

Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 tidak terlalu urgen atau tidak terlalu penting. Demikian penilaian anggota DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, mengaku telah bertemu beberapa direktur utama. Mereka menyampaikan sebenarnya BUMD tidak terlalu membutuhkan PMD. "Terkait PMD kepada beberapa BUMD saya setuju bahwa ada suatu koreksi yang serius. Saya bicara kepada direktur utama BUMD yang akan ajukan permohonan, dari wawancara saya tampaknya mereka *nggak* butuh amat," kata Bambang

dalam Rapat KUA-PPAS 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Ketika Bambang menanyakan hal tersebut, beberapa direktur utama mengaku, sebenarnya mereka bisa meminjam dari bank. "Saya tanya *nggak* apa-apa kalau *nggak* diberikan (PMD)? Kata mereka "*nggak* apa-apa". Kami bisa pinjam *loan* dari bank. Jadi, bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat," ucap Bambang.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, S Andyka, menyebutkan meski usulan besaran anggarannya turun Rp 1,7 triliun dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 8,03 triliun, namun PMD bukanlah prioritas.

"Terkait pemberian pinjaman daerah dari 2 jadi 1 (turun Rp 1,7 triliun) kami ingin bilang PMD tidak terlalu jadi prioritas,



Dok. Partai PAN

tapi belanja yang bersentuhan dengan masyarakat itu yang diprioritaskan," tutur Andyka. Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran usulan anggaran dalam KUA-PPAS untuk APBD 2020. Revisi anggaran dalam KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp 89,441 triliun. Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun. Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun. (kompas.com/faf)



Saya tanya nggak apa-apa kalau nggak diberikan (PMD)? Kata mereka "nggak apa-apa". Kami bisa pinjam loan dari bank. Jadi, bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat.

Bambang Kusumanto
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN

Dharma Jaya Tak Ajukan PMD

Selain merevisi besaran usulan anggaran dalam KUA-PPAS untuk APBD 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merevisi PMD bagi BUMD. Dalam draft KUA-PPAS 2020 sebelumnya PMD yang diajukan sebesar Rp 9,75 triliun untuk 7 BUMD.

Pada usulan kali ini, besarnya turun Rp 1,7 triliun menjadi Rp 8,03 triliun. "Pengeluaran ini kita lakukan penyesuaian BUMD termasuk PDAM," ujar

Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat KUA-PPAS 2020, Rabu (23/10). Perubahan anggaran ini terjadi karena PD Dharma Jaya yang sebelumnya mengajukan PMD sebesar Rp 100 miliar kini tak lagi mengajukan PMD.

Lalu, perubahan juga terjadi pada PDAM Jaya yang sebelumnya mengajukan PMD Rp 3,39 triliun menjadi Rp 1,77 triliun atau turun Rp 1,62 triliun. Sedangkan untuk lima BUMD lainnya, usulan PMD tak berubah.

Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran usulan anggaran dalam KUA-PPAS untuk APBD 2020. Revisi anggaran dalam KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp 89,441 triliun. Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun. Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun. "Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp 89,44 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. (kompas.com/faf)

PENGAJUAN PMD DARI BUMD

- PT MRT Jakarta sebesar Rp 2,64 triliun
- PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 2,38 triliun
- PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp 92,19 miliar
- PT Food Station sebesar Rp 150 miliar
- PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 999 miliar
- PD Dharma Jaya yang sebesar Rp 100 miliar (sebelum revisi)
 - Setelah revisi tidak mengajukan PMD
- PDAM Jaya sebesar Rp 3,39 triliun (sebelum revisi)
 - Setelah revisi sebesar Rp 1,77 triliun